

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum dalam garis besar yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Sebagaimana pentingnya sebuah perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, tentu penilaian pembelajaran juga tidak kalah pentingnya. Penilaian merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian maka dapat diketahui seberapa besar keberhasilan siswa dalam menguasai kompetensi atau materi yang telah dibelajarkan oleh guru. Melalui penilaian juga dapat diketahui mengenai keberhasilan dan efektivitas guru dalam pembelajaran.

Beberapa istilah yang sering digunakan secara bertukar dengan penilaian adalah pengukuran, tes dan evaluasi. Pengukuran merupakan sebuah prosedur penentuan dan penetapan skor untuk menentukan spesifikasi atribut atau karakteristik siswa. Sedangkan tes merupakan instrumen sistematis untuk mengobservasi dan mendeskripsikan satu atau lebih karakter siswa menggunakan skala numerik ataupun skema klasifikasi (Nitko, 1996; Ebel & Friesbie; 1991).

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Apabila belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya dan penilaian merupakan pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Kegiatan penilaian tidak dapat dilakukan sebelum mengadakan pengukuran (Arikunto, 2012, hlm. 3). Oleh karena itu penilaian merupakan bagian dari kegiatan evaluasi yang terfokus pada dimensi pembelajaran yang di dalamnya terkandung juga istilah tes dan pengukuran (Abidin, 2014, hlm. 66).

Penilaian merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran. Penilaian sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan bagi guru sebagai pedoman dalam mengambil ataupun menetapkan keputusan terhadap ada atau tidaknya perubahan yang terjadi sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian sebagai cara untuk menentukan ketuntasan belajar siswa. Kegiatan penilaian harus dapat dilaksanakan dengan

baik oleh guru sebab apabila terjadi kesalahan dalam penilaian hasil belajar siswa maka akan terjadi salah informasi mengenai kualitas pembelajaran yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan nasional pendidikan. Tentunya hal ini sangat bergantung pada kompetensi guru. Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh (Charles, 1994 dalam Mulyasa, 2011, hlm. 25) “*Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”. Apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa kompetensi adalah berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh guru berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan serta sikap atau perilaku dalam melaksanakan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Kompetensi sebagai komponen utama dari standar profesi disamping tentu adanya kode etik sebagai pedoman perilaku dan sistem pengawasan tertentu bagi seorang guru. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru antara lain yaitu kompetensi pedagogik (pasal 3 ayat 4), kompetensi kepribadian (pasal 3 ayat 5), kompetensi sosial (pasal 3 ayat 6) dan kompetensi profesional (pasal 3 ayat 7). Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian merupakan bagian penting dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik pada aspek evaluasi hasil belajar. Sehingga di dalam evaluasi hasil belajar terdiri atas kemampuan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, serta penilaian program Mulyasa (2011, hlm. 108).

Berdasarkan hal tersebut, penting bagi guru untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar dalam bentuk penilaian kelas, khususnya bagi seorang guru mata pelajaran. Namun, faktanya adalah sebagaimana yang ditemukan oleh Fulcher & Davidson (2007, hlm. 51) bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini masih menempatkan tes atau penilaian sebagai pelengkap proses pembelajaran.

Kondisi semacam ini harusnya mulai dihilangkan dan sebaliknya penilaianlah yang menjadi pemandu pembelajaran. Berdasarkan hasil temuan peneliti terdahulu dengan format penilaian yang terdapat dalam kurikulum sebelumnya diketahui bahwa kemampuan guru sudah cukup baik dalam membuat instrumen penilaian ranah (domain) afektif pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sekarang dikenal dengan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Ogan Ilir yang berupa *rating scale* seperti skala *likert*, skala *thurstone*, dan skala beda semantik (Camellia & Chotimah, 2012, hlm. 122). Walau masih terdapat beberapa kendala namun, hal tersebut merupakan modal bagi guru untuk dapat melaksanakan penilaian secara komprehensif pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Dengan demikian, guru perlu meningkatkan kreativitas dalam menilai kompetensi siswa bukan hanya pada ranah pengetahuan dan pembinaan karakter (sikap) saja tetapi juga melaksanakan dan menilai pengembangan keterampilan yang dimiliki oleh siswa melalui penilaian otentik sebagaimana yang dibutuhkan pada abad ini. Abad 21 sebagai abad informasi, komputasi, otomasi dan komunikasi. Tentu saja pendidikan harus menghasilkan siswa dengan lulusan yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif dan berkarakter. Sebagaimana tujuan mata pelajaran PPKn Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf ditegaskan:

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMP/MTs. Secara umum tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni (1). Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab keawarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2). Pengetahuan kewarganegaraan;

**Camellia, 2015**

*Implementasi Penilaian Otentik (Authentic Assessment) Dalam Menilai Kompetensi Kewarganegaraan Siswa*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*). Kemudian berdasarkan permendikbud yang sama, tujuan mata pelajaran PPKn secara khusus yaitu supaya siswa mampu:

1. Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
2. Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

Mata pelajaran PPKn adalah mata pelajaran wajib yang harus ada dalam tiap jenjang pendidikan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 ayat (1) yang menegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar (dikdas), pendidikan menengah (dikmen) dan pendidikan tinggi (dikti) wajib memuat PPKn. Penilaian pada mata pelajaran PPKn merupakan proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam mata pelajaran PPKn (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 351). Hasil penilaian tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran PPKn. Kemudian sebagai konsekuensi untuk memperoleh nilai yang baik maka para siswa harus sedikit bersusah payah (*more difficult to achieve*) dalam mengikuti pembelajaran (Budimansyah, 2010, hlm. 217). Nilai PPKn harus diperhitungkan dari keterlibatan siswa dalam proyek belajar, dari sikap dan perilakunya sehari-hari, dan sebagainya. Mata pelajaran PPKn yang syarat akan nilai-nilai dan karakter tersebut tentunya harus memiliki model penilaian yang mampu secara komprehensif mengakomodir nilai-nilai dan karakter tersebut antara lain dengan menggunakan penilaian yang otentik (*authentic assessment*).

Penggunaan penilaian otentik ini diyakini akan memberikan kemampuan kepada siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan bekerja secara sistematis bukan dengan jalan menerabas. Penilaian otentik berfungsi juga dalam membentuk sikap moral siswa yang selanjutnya dapat kita katakan membentuk karakter baik pada diri siswa. Penilaian otentik pertama kali dipopulerkan oleh Wiggins. Menurut Wiggins (1989):

*... conveys the idea that assessment should engage students in applying knowledge and skills in the same way they are used in the "real world" outside of school. Authentic assessment also reflect good instructional practice, so that teaching to the test is desirable.*

Kemudian menurut O'Malley & Pierce (1996, hlm. 4):

*Authentic assessment is an evaluation process that involves multiple forms of performance measurement reflecting the student's learning, achievement, motivation, and attitude on instructionally-relevant activities. Example of authentic assessment technique include performance assessment, portofolio, and self-assessment.*

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa penilaian otentik mampu membawa siswa pada konteks dunia mereka, mampu menilai sikap, pengetahuan dan keterampilan serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kinerja mereka. Dengan demikian, tentunya dapat meningkatkan mutu pembelajaran karena penilaian otentik pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai setiap aktivitas siswa selama pembelajaran. Sebagaimana pendapat Komalasari (2013, hlm. 148):

*"Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian otentik mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik), baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas, dan perolehan belajar selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas".*

Apabila siswa selama ini hanya mendengarkan ceramah saja, proses pembelajaran sebenarnya tidak sedang terjadi di kelas tersebut. Peranan penilaian dalam hal ini adalah menentukan spesifikasi kegiatan yang harus dilakukan siswa, menentukan standar atas spesifikasi kegiatan tersebut, serta menentukan skor bagi pencapaian yang diperoleh siswa selama aktivitas tersebut. Peran ini diyakini mampu

mendongkrak mutu proses pembelajaran yang lebih berorientasi pada pembentukan kemampuan siswa.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Hil & Ruptic (1994, hlm. 8) mengemukakan bahwa penilaian otentik tidak hanya sekedar menuntut siswa untuk mendemonstrasikan perilaku tertentu atau melengkapi tugas tertentu, melainkan juga harus mampu mengunjukkan sesuatu secara nyata dalam setiap tahapan pembelajaran di dalam kelas dan bahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan kegiatan ini, penilaian otentik akan menetapkan standar terukur yang mampu menilai siswa secara utuh dan tepat. Pentingnya penilaian otentik pada pembelajaran juga dikemukakan oleh Wormeli (2006, hlm. 33-34):

Guna meningkatkan mutu, proses pembelajaran haruslah diterapkan penilaian otentik yang mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat/nyata dan sekaligus mampu dijadikan dasar pengembangan proses pembelajaran. Tiga jenis penilaian otentik meliputi penilaian portofolio, rubrik dan penilaian diri. Penggunaan penilaian otentik merupakan sebuah pengembangan pembelajaran berbasis keadilan sekaligus pengembangan nuansa demokratis dalam pembelajaran.

Pendapat lain yang mendukung akan pentingnya penilaian otentik adalah Weeden, et.al. (2003, hlm. 12) “ Sebuah proses pembelajaran yang standar hanya dapat dibentuk melalui penilaian yang baik. Melalui pemanfaatan penilaian akan terbentuk standar proses pembelajaran sekaligus standar hasil pembelajaran”.

Berdasarkan pendapat tersebut, penilaian otentik dapat menjadi sebuah solusi bagi guru untuk membina dan mengembangkan karakter diri guru itu sendiri maupun karakter siswanya dalam proses pembelajaran. Sudah saatnya penilaian dijadikan pemandu proses pembelajaran. Melalui penilaian yang baik akan tercipta sebuah proses pembelajaran yang baik. Penilaian otentik dimaksudkan sebagai penilaian yang “adil” dimana guru dan sistem sekolah harus memperluasnya dengan demikian bentuk penilaian tidak hanya untuk mengakomodasi, tetapi juga untuk mendorong dan menuntut siswa menjadi lebih baik. Sebagaimana hasil penelitian Norris (2008, hlm. 230):

*Authentic learning and assessment experiences integrate the knomorwer and the knomorwn. The role of the teacher is to provide both content and processes that create spaces or thresholds through which students can take control of their own learning. The content, acting as a muse, evokes thoughts that guide artistic choices. The content, however, is nomort fixed but changes as the students rework it.*

Selain itu juga Romero (2010, hlm. 6) dalam penelitiannya memilih penilaian otentik dalam memecahkan beberapa permasalahan dalam pembelajaran:

*We must go beyond the proposal that the students “demonstrate the same (kind of) competences”. It is necessary for authentic assessment to enable the student to develop new emergent competences to face a changing society. Moreover, the application of knomorwledge and skills to the realm of “professional life” must be closely linked to the construction of a “social life”. The development of authentic assessments must correspond to what we have called “new operators” which include things like: ways of learning, forms of appropriation of knomorwledge, field organizers and evaluative context.*

Hal tersebut didukung juga oleh hasil penelitian eksperimen dari peneliti terdahulu, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penilaian pengetahuan semata. Sadeli (2010) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dan peningkatan kompetensi kewarganegaraan siswa SMP dengan menggunakan penilaian otentik dalam materi demokrasi pada mata pelajaran PPKn. Namun, pada saat itu penilaian otentik belum diamanatkan dalam kurikulum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta belum populer dikalangan civitas akademika. Dengan demikian, Beliau merekomendasikan untuk mengkaji implementasi penilaian otentik secara lebih mendalam dan komprehensif pada mata pelajaran PPKn.

Dengan demikian, merupakan suatu kebijakan yang tepat diberlakukan oleh pemerintah bagi mata pelajaran PPKn harus menggunakan penilaian otentik. Sebagaimana Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs yang berbunyi:

Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assessment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring dan lain-lain. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.

Kemudian dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen), pasal 1 ayat 2:

Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan

yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.

Berdasarkan beberapa hal tersebut tentunya menjadi alasan utama perlunya menggunakan penilaian yang otentik dalam menilai kompetensi siswa. Kompetensi tersebut mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berikut penjelasan masing-masing kompetensi sebagai hasil analisis peneliti:

#### 1. Penilaian sikap

Penilaian kompetensi sikap dibagi menjadi dua yakni sikap spiritual yang berkaitan dengan pembentukan siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian sikap social berkaitan dengan pembentukan siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, beriman, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Apabila dihubungkan dengan kompetensi kewarganegaraan siswa maka akan berhubungan dengan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) yaitu keteguhan, komitmen dan tanggung jawab keawarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*). Teknik penilaian otentik yang dapat digunakan dalam menilai kompetensi ini misalnya melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh siswa dan melalui jurnal. Instrumen yang dapat digunakan untuk observasi, penilaian diri dan penilaian antarsiswa adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik sedangkan pada jurnal berupa catatan guru.

#### 2. Penilaian pengetahuan

Pencapaian kompetensi pengetahuan PPKn pada jenjang SD/MI adalah mengingat, pada SMP/MTs adalah memahami dan menerapkan, pada SMA/MA adalah memahami, menganalisis dan mengevaluasi. Tahapan ini sangat penting untuk dipahami guru dalam menyusun kisi-kisi penilaian. Apabila dihubungkan dengan kompetensi kewarganegaraan siswa maka penilaian pengetahuan sama halnya dengan menilai *civic knowledge/* pengetahuan kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan yang harus dimiliki seorang warga negara setelah belajar mata pelajaran PPKn berdasarkan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) yang tersedia disetiap jenjang pendidikan. Penilaian kompetensi pengetahuan dapat dilakukan dengan teknis tes tertulis (soal pilihan ganda, isian,



jawaban singkat, benar salah, menjodohkan dan uraian) disertai dengan pedoman penskoran, tes lisan dengan daftar pertanyaan dan penugasan berupa proyek untuk individu maupun kelompok.

### 3. Penilaian keterampilan

Kompetensi keterampilan pada mata pelajaran PPKn pada SD/MI yaitu mengamati dan menanya, pada SMP/MTs yaitu mencoba (interaksi dan partisipasi kewarganegaraan), menyaji dan menalar, pada SMA/MA/SMK/MAK yaitu mencoba dan menyajikan. Tahapan ini juga harus dipahami guru untuk menyusun penilaian. Apabila dihubungkan dengan kompetensi kewarganegaraan maka akan sama dengan keterampilan kewarganegaraan/ *civic skill* yaitu kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*). Penilaian yang dapat digunakan berupa penilaian kinerja seperti tes praktik (simulasi, sosiodrama), portofolio, dan proyek yang berhubungan dengan kePPKn.

Ketiga aspek tersebut dapat dicapai apabila di dukung dengan pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn. Pengorganisasi ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn dikembangkan dengan materi pembelajaran sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia. Kedalaman dan keluasan materi dapat dilihat dari rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang merupakan gradasi setiap kompetensi. Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs) diketahui bahwa:

1. Pengembangan KI dan KD ranah sikap jenjang SD/MI pada kemampuan menerima dan menjalankan, pada jenjang SMP/MTs kemampuan menghargai dan menghayati, dan jenjang SMA/SMK kemampuan menghayati dan mengamalkan.
2. Pengembangan KI dan KD ranah pengetahuan jenjang SD/MI pada kemampuan mengetahui, pada jenjang SMP/MTs kemampuan memahami dan menerapkan, dan jenjang SMA/SMK kemampuan memahami, menganalisa dan mengevaluasi.
3. Pengembangan KI dan KD ranah keterampilan jenjang SD/MI pada kemampuan mengamati dan menanya; pada jenjang SMP/MTs kemampuan mencoba, menyaji dan menalar; dan jenjang SMA/SMK kemampuan menyaji.

4. Ruang lingkup pengetahuan Jenjang SD pada pengetahuan faktual dan konsep; jenjang SMP pengetahuan faktual, konsep, dan prosedur; dan jenjang SMA pengetahuan faktual, konsep, prosedur dan metakognitif (teori). Lingkungan pengembangan pengetahuan pada jenjang SD pada keluarga dan teman bermain; jenjang SMP pada sekolah dan pergaulan sabaya; jenjang SMA pada bangsa dan negara serta pergaulan dunia.

Sekarang yang menjadi aspek pentingnya adalah mengenai kesadaran guru mata pelajaran PPKn dalam mengimplementasikan penilaian otentik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, siswa dan guru sebagai bagian dari kurikulum 2013. Pemberlakuan kurikulum ini juga didukung oleh usaha pemerintah dengan adanya bantuan buku teks pelajaran, serta adanya kegiatan penyegaran/pelatihan bagi guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, serta adanya sekolah sebagai *piloting* bagi sekolah lain dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 salah satunya SMP Negeri 1 Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang ketahu dari studi pendahuluan dan informasi dari beberapa informan.

Sebagai seorang mahasiswa program studi PKn (PPKn) tentunya menjadi suatu keharusan untuk memiliki perhatian mengenai ruang lingkup ke-PPKn-an khususnya bagian penilaian. Karena penilaian kompetensi kewarganegaraan pada matapelajaran PPKn merupakan bagian penting dari kegiatan pembelajaran yang dapat mendukung dan menentukan kualitas dari pembelajaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran mengenai aktivitas guru dalam mengimplementasikan ilmu yang Beliau dapat mengenai penilaian otentik sebagai sebuah solusi dan sarana bagi guru mata pelajaran PPKn yang lainnya sehingga dapat mengetahui, memahami dan juga mampu melaksanakan penilaian otentik dalam pembelajaran PPKn serta memperoleh gambaran mengenai persepsi siswa dan tingkat ketercapaian kompetensi kewarganegaraan siswa. Sebab, apabila guru mata pelajaran PPKn tidak dapat melaksanakan ataupun tidak mau melaksanakan penilaian otentik tersebut, tentunya akan mengganggu bahkan mengancam kualitas pembelajaran serta menghambat kualitas siswa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun (UUDNRI) 1945, dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (pasal 3):

**Camellia, 2015**

*Implementasi Penilaian Otentik (Authentic Assessment) Dalam Menilai Kompetensi Kewarganegaraan Siswa*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, kedudukan penilaian otentik dalam proses pembelajaran berpotensi besar dalam mengembangkan proses pembelajaran yang baik, pencapaian hasil belajar yang baik dan mengembangkan karakter siswa dan gurunya.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan temuan peneliti terdahulu bahwa penilaian otentik pada mata pelajaran PPKn dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa. Pembelajaran merupakan implementasi kurikulum dalam garis besar, dengan demikian kegiatan pembelajaran menuntut adanya penilaian yang utuh, secara komprehensif dapat menilai setiap kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajaran termasuk mata pelajaran PPKn. Kompetensi tersebut seperti kompetensi, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kesemua kompetensi ini hanya dapat dinilai menggunakan penilaian otentik.
2. Adanya tuntutan perubahan kurikulum di Indonesia dari KTSP menjadi Kurikulum 2013 yang mengharuskan penggunaan penilaian otentik pada semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran PPKn yang tentunya menuntut kemampuan guru dalam mengimplementasikannya meliputi pemahaman, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan penilaian serta didukung dengan persepsi siswa mengenai implementasi penilaian tersebut dan tingkat capaian kompetensi kewarganegaraan yang diperoleh oleh siswa.
3. Kemampuan guru dalam mengimplementasikan penilaian otentik (*Authentic Assessment*) merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru sebagai bentuk tanggung jawab profesionalisme guru.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pemahaman guru mengenai penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa?
2. Bagaimana guru membuat perencanaan penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa?
3. Bagaimana guru melaksanakan proses penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa?
4. Bagaimana guru melaporkan/menyimpulkan hasil penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa?
5. Bagaimana persepsi siswa mengenai implementasi penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa?
6. Bagaimana tingkat ketercapaian kompetensi kewarganegaraan siswa melalui penilaian otentik?

### 1.4 Tujuan Penelitian

#### 1.4.1 Tujuan Umum:

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskriptif analitis mengenai implementasi penilaian otentik (*authentic assessment*) dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa pada mata pelajaran PPKn di SMP N 1 Tanjung Raja. Dimana sekolah tersebut merupakan sekolah model kurikulum 2013.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus:

- a. Untuk memperoleh gambaran pemahaman guru mengenai penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa
- b. Untuk mengetahui cara guru membuat perencanaan penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa
- c. Untuk mengamati guru saat melaksanakan proses penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa
- d. Untuk mengkaji kegiatan guru melaporkan/menyimpulkan hasil penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa

- e. Untuk menggali informasi mengenai persepsi siswa tentang implementasi penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa
- f. Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat ketercapaian kompetensi kewarganegaraan siswa melalui penilaian otentik

## **1.5 Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat/ signifikansi dari segi teori**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran dan mengembangkan ilmu serta pengetahuan yang berhubungan dengan penilaian otentik (*authentic assessment*) pada mata pelajaran PPKn, sehingga guru dapat dengan maksimal melaksanakan penilaian tersebut guna meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran PPKn.

### **1.5.2 Manfaat/ signifikansi dari segi kebijakan dan praktik**

Penilaian otentik sebagai kendaraan menuju perubahan kearah yang lebih baik, sehingga penting bagi guru untuk melaksanakan penilaian otentik dalam menilai kompetensi kewarganegaraan siswa, namun faktanya berdasarkan hasil temuan peneliti terdahulu penilaian pada mata pelajaran PPKn masih sering didominasi oleh tes tertulis guna menilai kompetensi kognitif saja. Melalui hasil penelitian ini diharapkan guru dapat memahami, mampu merencanakan penilaian, melaksanakan dan melaporkan dengan baik penilaian tersebut dan termotivasi dari rekannya yang telah melaksanakan penilaian tersebut. Serta dapat memperoleh informasi dan gambaran mengenai persepsi siswa dan tingkat ketercapaian kompetensi kewarganegaraan siswa melalui penilaian otentik.

### **1.5.3 Manfaat/ signifikansi dari segi isu serta aksi sosial**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti guna menambah wawasan keilmuan peneliti di bidang penilaian. Dengan adanya penelitian mengenai penilaian otentik ini (*authentic assessment*), diharapkan peneliti dapat dengan maksimal memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai suatu pijakan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas ketika telah terjun sebagai seorang dosen/ guru, sebab penilaian yang baik akan menuntun pada proses

pembelajaran dan hasil pembelajaran yang baik serta bermanfaat dalam meningkatkan kualitas siswa.

## 1.6 Struktur Organisasi Tesis

Bagian ini merupakan rincian tentang urutan penulisan mulai dari bab dan bagian dari bab dalam tesis peneliti, yaitu mulai dari bab pertama sampai bab terakhir, yang dapat peneliti deskripsikan berdasarkan kerangka penulisan karya ilmiah. Berikut sistematika penulisan tesis peneliti.

Bab I, menguraikan beberapa kajian pendahuluan yang dibagi dalam bentuk sub bab sebagai berikut: (1.1) Latar Belakang Penelitian, (1.2) Identifikasi Masalah Penelitian, (1.3) Rumusan Masalah Penelitian, (1.4) Tujuan Penelitian, (1.5) Manfaat Penelitian, dan (1.6) Struktur Organisasi Tesis.

Bab II, bab ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kajian pustaka yang berisi gambaran (deskripsi), analisis dan rekonseptualisasi dari penulis. Bab kajian pustaka ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu (2.1) Pengertian Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi, (2.2) Penilaian Otentik (*Authentic Assessment*) yang terdiri dari Pengertian Penilaian Otentik, Prinsip-Prinsip Penilaian Otentik, Karakteristik Penilaian Otentik, Penilaian Tradisional vs Penilaian Otentik, Fungsi dan Manfaat Penilaian Otentik, Keunggulan Penilaian Otentik, Langkah-Langkah Penilaian Otentik, Teknik Penilaian Otentik. Kemudian (2.3) Penilaian Otentik dalam PPKn yang terdiri dari: Hakikat Mata pelajaran PPKn dan Penilaian Otentik dalam Menilai Kompetensi Kewarganegaraan. Selanjutnya (2.4) Analisis Penelitian Terdahulu/ Jurnal dan (2.5) Kerangka Berpikir.

Bab III, akan menguraikan metode penelitian. Dalam bab metodologi penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab berikut: (3.1) Desain Penelitian, (3.2) Metode Penelitian, (3.3) Partisipan dan Tempat Penelitian, (3.4) Defenisi Konseptual, (3.5) Instrumen Penelitian, (3.6) Uji Keabsahan, (3.7) Teknik Pengumpulan Data, (3.8) Teknik Analisa Data, (3.9) Isu Etik.

Bab IV, dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub bab yaitu: (4.1) Deskripsi Lokasi Penelitian, (B) Deskripsi hasil Penelitian atau Temuan Penelitian, dan (4.3) Pembahasan hasil Penelitian.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang disebut dengan Bab Simpulan dan Rekomendasi. Seperti halnya bab-bab sebelumnya, bab ini juga terdiri dari sub bab yang menyusun yaitu, (5.1) Simpulan, yang akan menyajikan uraian singkat mengenai hasil dan pembahasan penelitian dalam bentuk rekonseptualisasi, dan (5.2) Rekomendasi, berupa masukan atau saran kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan permasalahan penelitian yang dikaji.